

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 2.1.1 Sejarah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran** yang dapat kita singkat menjadi kemendikbud kementerian ini sendiri bergerak hanya dalam suatu bidang didalam pemerintahan Indonesia yang memiliki tugas dalam pengurusan suatu sektor di republik Indonesia yang bergerak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendirian, dan keberlangsungan pada bidang pendidikan bagi anak usia 3-5, anak usia dasar, anak yang membutuhkan pendidikan menengah, dan mendapatkan suatu pendidikan dari masyarakat, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh unit kebudayaan yang ada pada republik Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada masa pra-merdeka pendidikan ialah menjadi suatu hal yang sangat menjadi konsentrasi tujuan pada masa itu hal ini memiliki maksud untuk mencerdaskan kaum pribumi di masa era tersebut. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan pada era tersebut pendidikan dimasa itu lebih menguntungkan bagi pihak penjajah yang pada saat itu masih menjajah republik Indonesia. Pada era tersebut seluruh pemuda Indonesia memiliki semangat yang berapi-api dan begitu kental untuk menjadi suatu bagian dari bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat secepatnya mendapatkan identitas suatu bangsa yang diinginkan pada masa itu. Pada masa itu bangsa Indonesia berjuang untuk membangun Indonesia dan membawa bangsa Indonesia ke titik yang lebih layak bagi Indonesia. Pada masa tersebut seluruh fokus presiden diberikan untuk memberikan seluruh instruksi kepada Menteri-mentri yang menjabat pada masa itu yang memiliki tugas untuk memompa sebuah semangat dalam memperjuangkan pendidikan bagi seluruh pemuda- pemudi Indonesia yang ada pada masa tersebut. Pada masa tersebut seluruh pemuda-pemudi diwajibkan dan diinstruksikannn langsung oleh presiden memiliki kewajiban bersekolah dan wajib mengikuti upacara setiap harinya untuk melantunkan Indonesia raya agar pihak penjajah dapat mendengar dan dapat

menghilangkan lagu kebangsaan yang lain pada masa itu. Organisasi yang bergerak pada masa tersebut diberikan nama Kementerian Pengajaran kementerian ini sendiri masih sangat sederhana untuk menjunjung pendidikan di Indonesia. Namun dengan kesadaran dari pihak pemerintahan yang memiliki jabatan dan tanggung jawab pada bidang pendidikan pada masa itu untuk menyiapkan seluruh materi yang dapat diajarkan untuk seluruh pemuda-pemudi di Republik Indonesia. Untuk seluruh Menteri yang memiliki tanggung jawab dan memiliki jabatan pada masa itu pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Selanjutnya pada masa Kabinet Syahrir I, selanjutnya Menteri yang dipercayakan untuk menjabat pada masa tersebut yaitu Mr. Mulia. Mr. Mulia yang melakukan berbagai Tindakan pada sektor pendidikan dimasa tersebut Tindakan yang dimaksud adalah meneruskan dan memperbaiki seluruh peraturan yang ada pada bidang kurikulum dan menambahkan suatu wawasan tentang kebangsaan Indonesia. Hal ini ditujukan untuk dapat menambahkan suatu layanan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, dan juga pada masa tersebut Menteri melakukan penambahan pada bagian pengajar agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan merata seperti yang diinginkan oleh menteri. Masa era Kabinet Syahrir II, dan Menteri Pengajaran yang pada saat itu ditunjuk untuk menjabat oleh Muhammad Sjafei sampai dengan tanggal 2 Oktober 1946. Masa setelahnya Menteri yang menjabat adalah Mr. Soewandi dengan masa akhir jabatan 27 Juni 1947. Masa era Mr. Soewandi ini dibentuklah organisasi yang bertujuan untuk menyelidiki seluruh kurikulum dan Teknik pengajaran yang diberlakukan di Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ki Hadjar Dewantara.

#### 1. Masa era reformasi liberal (1951- 1959)

Dapat dikatakan pada masa era reformasi liberal ini stabilitas dari politik menjadi sesuatu bentuk yang langka, demikian halnya dengan program yang dapat dijadikan suatu tonggak bagi politik, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, yang berlangsung sekitar sembilan tahun, dan telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Yaitu Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, dan setelahnya menunjuk Dr. Bahder Johan untuk selanjutnya menjadi Menteri Pengajaran Pendidikan

dan Kebudayaan (PP dan K). pada bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro untuk menjadi Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat sebagai Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian selanjutnya digantikan oleh Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino dan Prof.Dr.Prijono. Pada era tersebut kebijakan yang ditetapkan pada bidang pendidikan merupakan suatu lanjutan yang telah dilakukan dari masa sebelumnya dan diperbaiki pada masa lanjutan. Namun pada era tersebut adanya yang menarik bagi bidang pendidikan yaitu lahirnya bentuk perlindungan hukum yang legal yang dibuat untuk bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

## 2. Masa Era demokrasi terpimpin (1959-1966)

Presiden sebelumnya mengakhiri suatu era yaitu demokrasi parlementer, namun era tersebut secepatnya digantikan dengan adanya era demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin banyaknya musibah yang terjadi dibangsa Indonesia. salah satunya adalah kejadian dengan belanda dalam menanggulangi masa pada Irian barat, selanjutnya adanya terjadi G30S/PKI yang menjadi suatu ujian yang berat bagi bangsa Indonesia. Dalam penjabatan Menteri tanggal 10 juli 1959- 18 february 1960 jabatan yang dimiliki oleh kementerian diberikan nama baru menjadi Menteri muda. Bagi Kementrian yang mengurus bidang Pendidikan akhirnya membagi menjadi tiga Menteri muda. menteri muda yang bergerak pada bidang social kulturil yang di pimpin oleh Dr. prijono, selanjutnya ada Menteri muda PP dan K dipimpin oleh sudibjo, dan yang terakhir adanya Menteri muda yang mengelola urusan pengerahan dari tenaga rakyat dipegang langsung sujono.

## 3. Masa Era Orde baru (1966 – 1998)

Adanya pergerakan pemberontakan di dalam bangsa Indonesia yaitu G30S/PKI yang berhasil diamankan dengan adanya waktu peralihan yang terjadi dari era demokrasi terpimpin ke masa demokrasi Pancasila. Pada era tersebut yang pada masa itu dikenal dengan masa Orde Baru yang dipimpin langsung oleh bapak Presiden yang menjabat pada masa

tersebut yaitu bapak Soeharto. Dengan adanya pembaharuan daam bidang pendidikan dimasa orde baru yang memiliki banyak perubahan dalam orde yang memiliki masa Panjang yaitu 32 tahun dengan pemimpin yang sama. Dengan adanya pembaharuan yaitu adalah kewajiban penataran melakukan penataran bagi peserta didik dalam menormalisasi kehidupan kampus, mendirikan OSIS, menyempurnakan ejaan Bahasa Indonesia dan diberikannya suatu tanggung jawab bagi mahasiswa yaitu melakukan kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa. Pada masa itu ditahun 1978 tahun ajaran baru ditetapkan dimulai pada bulan Juni. Sebuah pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan yang juga berkembang dengan sangat pesat pada masa era Orde Baru tersebut. Pada Menteri yang menjabat pada masa era Orde Baru diantaranya adalah Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notokusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar

#### 4. Masa Era reformasi (1998-2011)

Setelah berhasil memenangkan enam kali Pemilu, sampailah orde baru mengakhiri era masanya dalam republik indonesia. Adanya kejadian yang dialami oleh bangsa Indonesia yang berakar dari adanya krisis politik dan ekonomi tepatnya ditahun 1998 indonesia keos menghadapi demo yang dilakukan oleh banyaknya mahasiswa. Adanya demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran pada tahun 1998 yang bertujuan untuk menurunkan jabatan Soeharto dari jabatan yang dimilikinya pada masa itu yaitu jabatan presiden yang dimilkinya. Kabinet Menteri pertama yang dibentuk setelah pemilu yang dipimpin secara langsung oleh Abdurrahman Wahid. Pada era tersebut sektor Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan pengubahan nama menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan dipimpin oleh Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan yang menjabat pada masa itu. Ditahun 2001 MPR memberikan tugas kepada Abdurrahman Wahid untuk menghadiri sidang istimewa MPR dan memberikan jabatan lansung kepada ibu Megawati Soekarnoputri yang mendapatkan jabatan sebagai presiden Republik Indonesia. Pada waktu tersebut pemerintah yang dipimpin oleh ibu Megawati dan Mendiknas yang dijabat oleh Prof. Drs. A. Malik Fadjar,

M.Sc. dalam pemilihan secara umum dan terbuka pada tahun 2004 dan 2009 seluruh rakyat Indonesia sudah dapat memilih secara langsung. Pada tahun selanjutnya ada bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil mendapatkan jabatan presiden sebanyak 2 kali berturut-turut atas pemilihannya sebagai presiden RI yang menjabat pada waktu itu. Selama periode jabatan bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas yang terpilih pada saat itu ialah Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Namun dikarenakan adanya pembaharuan jabatan setiap tahunnya pada tahun 2011 nama departemen mendapatkan pergantian nama menjadi kementerian dan selanjutnya 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan akhirnya dipersatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

### 2.1.2 Visi dan Misi

#### Visi :

Visi menurut Aditya (2010) adalah bagaimana pandangan dari perusahaan itu sendiri memandang atau membuat suatu strategi untuk perusahaannya sendiri untuk mendapatkan suatu tujuan dimasa mendatang dan perusahaan tersebut dapat mengerti dan tau apa yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai titik kesuksesan yang diinginkan atau menjadi suatu goals untuk perusahaan.

Dibawah ini adalah Visi dari kementerian Pendidikan budaya riset dikti dan pusat kurikulum dan perubukuan :

***"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"***

#### Misi :

Bagi Wibisono (2006) misi yaitu penetapan dari sasaran ataupun tujuan yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek biasanya dalam kurun waktu 1-3 tahun.

Dibawah ini adalah Misi dari kementerian Pendidikan budaya riset dikti pusat kurikulum dan perbukuan :

1. Mewujudkan suatu bentuk pendidikan yang relevan dan memiliki kualitas yang tinggi, merata dan berkelanjutan, dengan didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang baik pada era tersebut.
2. Upaya dalam mewujudkan pelestarian dalam memajukan suatu kebudayaan yang bertujuan mengembangkan suatu Bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk nantinya mendukung sebuah transformasi dan reformasi dalam bidang pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

## **2.2 Struktur Organisasi**

Pengertian struktur organisasi menurut Robbins dan Judge (2014 :231) struktur organisasi adalah untuk menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan di koordinasikan secara formal. Pada kegiatan kerja profesi, praktikan bekerja dibawah pimpinan subtransi rumah tangga, dimana pimpinan rumah tangga ini bertanggung jawab penuh terhadap divisi dibawahnya, yaitu staff subtransi rumah tangga. Berikut struktur organisasi pada kementerian Pendidikan budaya riset dikti dan tekonologi pusat kurikulum dan pembukuan.

### **2.2.1 Kegiatan Umum Pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Dikti dan Tekonologi Pusat Kurikulum dan Pembukuan**



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi**

Rincian tugas unit kerja dibawah ini diambil dari peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia tahun 28 tahun 2019 yang berisi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 861 peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan perturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 11 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan dan kebudayaan, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang

rinci tugas unit kerja di lingkungan badan pengembangan Bahasa dan perbukuan.  
Rincian tugas unit kerja sebagai berikut :

1. Kegiatan umum kepala pusat kurikulum pembukuan
  - a. Mengatur, mengelola, dan menganalisis segala aktifitas perusahaan.
  - b. Mendatangi pertemuan pusat kurikulum dan perbukuan.
  - c. Mengatur dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan.
  - d. Memantau kinerja karyawan dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
  - e. Mengelola proses anggaran perusahaan.

Dari pernyataan diatas, praktikan dapat mengetahui tugas dari kepala pusat kurikulum adalah mengatur, memimpin dan mengarahkan perusahaan ke titik kesuksesan dan membawa pusat kurikulum kepada visi dan misi yang diinginkan. Kepala pusat kurikulum mempunyai peran yang sangat penting dan memiliki kuasa terbesar dari pengambilan keputusan yang terjadi antara setiap kepala divisi lainnya dan anggota yang dikelolanya. Kepala pusat kurikulum juga memiliki tanggung jawab penuh dari semua kegiatan yang dilakukan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan riset dikti pusat kurikulum dan pembukuan, kepala pusat juga harus memastikan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing divisi berjalan dengan baik.

2. Kegiatan umum kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - a. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan
  - b. Memonitor pekerjaan staf administrasi dan tenaga harian.
  - c. Membantu proses penyelenggaraan seminar atau pertemuan rutin
  - d. Menghadiri rapat-rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah administrasi tata usaha dan rumah tangga.
  - e. Mengatur jadwal rapat pimpinan
  - f. Mengelola dan mempertanggung jawabkan pengeluaran rumah tangga
  - g. Memonitor bagian sub rumah tangga kantor
  - h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan tata usaha dan rumah tangga sekaligus memantau kendaraan dinas kantor.



Dari pernyataan diatas praktikan dapat memahami bahwa kepala sub bagian tata usaha adalah salah satu yang memiliki peranan besar pada perusahaan yaitu kepala sub bagian tata usaha mengontrol segala fasilitas yang disediakan oleh kantor, hal ini sangat penting karena fasilitas kantor digunakan setiap harinya, dan kepala sub bagian juga mengurus tentang segala pengadministrasian kendaraan dinas yang tersedia dikantor yang dilaporkan oleh bagian rumah tangga yang akan nantinya dikelola. Kepala sub bagian tata usaha juga mempunyai hubungan langsung dengan koordinator keuangan dan rumah tangga untuk melakukan pengontrolan segala hal yang ada pada unit kantor, dan kepala sub bagian tata usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melakukan validasi dari kegiatan yang dimiliki oleh keuangan dan rumah tangga.

3. Kegiatan umum koordinator 1 dan 2

- a. bertanggung jawab atas kurikulum yang sedang berjalan
- b. mengevaluasi kurikulum berdasarkan permintaan pimpinan
- c. melakukan survey kepada kelayakan program kurikulum
- d. meminjau secara langsung keseluruhan efektivitas dan efisiensi gambaran program kedepan

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa koordinator 1 dan 2 ini memiliki tugas secara langsung menangani kurikulum yang sedang berjalan didalam suatu program yang dirancang oleh pusat kurikulum dan pembukuan.

4. Kegiatan umum Pengembangan dan penyusunan buku serta pengembangan system informasi perbukuan

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja
- b. Melaksanakan kodifikasi Bahasa
- c. Melaksanakan penyusunan bahan acuan sastra
- d. Melaksanakan pengayaan kosakata
- e. Melaksanakan penyusunan bahan instrument Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Bahasa dan sastra
- g. Melakukan pengecekan pada setiap buku yang sudah didata oleh staff adminitrasi rumah tangga
- h. Melakukan pengecekan kelayakan pada setiap buku yang masuk

- i. Mengesahkan judul buku dan mengesahkan surat edar buku untuk penjualan dipasaran.
- j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dibidang pengembangan.
- k. Melakukan suatu penyiapan fasilitasi dalam pelaksanaan dibidang hubungan masyarakat untuk pengembangan dan pembinaan dalam bidang pembukuan.
- l. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hubungn dibidang pengembangan.

Dari pernyataan diatas kegiatan umum pengembangan dan penyusunan buku serta pengembangan system informasi perbukuan memiliki tugas utama bertanggung jawabkan segala buku yang akan terbit ke pasaran dan melakukan uji dan survey terhadap buku itu sendiri.

- 5. Kegiatan umum Penelitian dan pengawasan buku serta pemberdayaan sumber daya perbukuan.
  - a. Melakukan survey ke beberapa tempat mencari tau apakah ditempat yang disurvey memiliki sumber daya buku yang layak.
  - b. Melakukan penyajian data dan informasi dibidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan system perbukuan.
  - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan system informasi kebahasaan, kesastraan dan perbukuan.
  - d. Malakukan penyusunan program kerja
  - e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan system perbukuan.
  - f. Melakukan pendokumentasian kegiatan dibidang pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan system perbukuan.
  - g. Melakukan analisis data dan informasi dibidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan system perbukuan.
  - h. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen

- i. Melakukan penyusunan laporan

Dari pernyataan diatas tugas utama kegiatan umum dari divisi ini adalah penanggung jawab dari program pengembangan dan pembinaan dari kegiatan yang ada dan sedang dijalankan oleh kementerian Pendidikan dan budaya pusat kurikulum pusat perbukuan. Serta melakukan pengolahan data dari kegiatan yang telah dilakukannya dan dibuat menjadi sebuah laporan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh divisi pengembangan dan penyusunan buku.

6. Kegiatan umum koordinator keuangan dan rumah tangga

- a. Melakukan penyusunan program kerja
- b. Melakukan suatu penyusunan konsep untuk program kerja pada bagian umum dan publikasi
- c. Melakukan suatu penataan, pemeliharaan dan usul penghapusan arsip pada lingkungan badan.
- d. Melakukan penerimaan , pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar badan
- e. Melakukan penyusunan bahan rapat pimpinan dibidang pengembangan , pembinaan dan peerlindungan bhasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan system perbukuan.
- f. Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas badan
- g. Melakukan urusan administras tugas kedinasan pimpinan badan
- h. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan badan
- i. Melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, Gedung kantor, wisa dan rumah jabatan serta sarana dan prasarana lainnya dilingkungan badan
- j. Melakukan suatu urusan pemeliharaan dan perawatan peralatan di lingkungan kantor, kendaan dinas, Gedung kantor, wisma dan rumah jabatan serta sarana dan prasarana lainnya pada lingkungan badan.
- k. Melakukan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik di lingkungan badan

- l. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggan badan
- m. Melakukan penyiapan dan pemeliharaan dokumen
- n. Melakukan penyusunan laporan
- o. Melakukan penyusunan konsep laporan bagian umum dan publikasi

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa kegiatan umum dari keuangan dan rumah tangga adalah mengurus, merawat, memantau, dan bertanggung jawab atas fasilitas kantor dan melakukan pendataan fasilitas yang ada dikantor yang setiap bulannya membuat laporan untu nantinya diberikan kepada atasan yaitu kepala sub bagian tata usaha, divisi rumah tangga juga bertanggung jawab terhadap beberapa acara kantor dan program kantor yang sedang berjalan atau akan diadakan setiap waktunya. Koordinator rumah tangga juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan segala hal kegiatan yang dilakukan oleh divisi nya kepada kepala sub bagian tata usaha seperti apa yang digambarkan pada bagan. Setiap kegiatan yang telah disetujui dan dilakukan oleh kegiatan rumah tangga ataupun ada barang, fasilitas dan unit kendaraan dinas yang bermasalah, melakukan penggantian atau service, sub bagian rumah tangga harus memberikan laporannya terhadap kepala bagian tata usaha.

Dengan tugas-tugas yang praktikan jabarkan pada pernyataan diatas, dapat simpulkan bahwa setiap jabatan memiliki kewajibannya masing-masing untuk memnuhi tugas dan kewajiban yang dimilikinya, sub kepala tata usaha yang mengepalai divisi rumah tangga, setiap apapun keperluan divisi rumah tangga ataupun kantor, maka laporan yang dibuat harus memiliki persetujuan sub kepala tata usaha, karena koordinator keuangan dan rumah tangga dibawah oleh kepala sub tata usaha, hal ini bis akita lihat secara langsung melalui struktur organisasi yang tergambar pada Gambar 2.1, dapat kita lihat bahawa sub kepala tata usaha adalah pimpinan langsung bagi koordinator keuangan dan rumah tangga.